



Integration of Science and Theology: Transformation of Religious Paradigm in National Disaster Mitigation Policy

Integrasi Sains dan Teologi: Transformasi Paradigma Keagamaan dalam Kebijakan Mitigasi Bencana Nasional

Venny Rosalina

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

Author Correspondence Email: venny.rosalina@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 7 th , 2026)	Accepted (June 7 th , 2026)
-----------------	---	---	---

News Article

Keyword:

*Dichotomy of Science;
Disaster Mitigation;
Ecotheology;
Literalism;
Theological Fatalism*

Abstract

The integration of spiritual values and scientific data is crucial in facing the increasing frequency of natural disasters in Indonesia. Thus far, overly technocratic disaster management policies have often failed at the grassroots level due to ignoring the emotional and theological attachment of society to nature. The phenomenon of theological fatalism, where disasters are perceived as an absolute destiny that cannot be intervened, remains a major obstacle to human agency in taking preventive actions. This policy paper aims to formulate a transformation of religious paradigms through an ecotheological approach to eliminate the dichotomy between religious studies and disaster science. The policy methodology employed includes problem identification using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method to determine handling priorities, alongside root cause analysis using a fishbone diagram. The analysis results indicate that theological fatalism is the most pressing issue, rooted in literal interpretations of texts and the limitations of hermeneutical methodology in traditional educational institutions. Based on scoring using William N. Dunn's criteria, the recommended policy alternatives include a Regulation of the Minister of Religious Affairs on Mainstreaming Ecotheology in the Religious Education Curriculum and the standardization of ecological competence for religious extension officers. The implementation of this policy is expected to reshape anthropocentric views into ecocentric ones, transforming passivity into responsive agency, and uniting reason and faith as the foundation of national resilience. By integrating science-based disaster literacy into spiritual narratives, the role of religion transforms from mere ritual practice into a dynamic and sustainable instrument for saving lives for the public good amidst the threat of the global environmental crisis.

Kata Kunci:

*Dikotomi Ilmu;
Ekoteologi;
Fatalisme
Teologis;
Literalisme;*

Abstrak

Integrasi antara nilai spiritual dan data saintifik menjadi krusial dalam menghadapi frekuensi bencana alam yang terus meningkat di Indonesia. Selama ini, kebijakan penanggulangan bencana yang terlalu teknokratis seringkali gagal di tingkat akar rumput karena mengabaikan keterikatan emosional dan teologis masyarakat terhadap alam. Fenomena fatalisme

Mitigasi
Bencana

teologis, di mana bencana dianggap sebagai takdir absolut yang tidak dapat diintervensi, menjadi penghambat utama agensi manusia dalam melakukan tindakan preventif. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan transformasi paradigma keagamaan melalui pendekatan ekoteologi guna menghapus dikotomi antara ilmu agama dan sains bencana. Metodologi kebijakan yang digunakan mencakup identifikasi masalah dengan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganan, serta analisis akar masalah menggunakan diagram *fishbone*. Hasil analisis menunjukkan bahwa fatalisme teologis merupakan masalah paling mendesak yang berakar pada literalisme penafsiran teks dan keterbatasan metodologi hermeneutika di lembaga pendidikan tradisional. Berdasarkan scoring menggunakan kriteria William N. Dunn, direkomendasikan alternatif kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama tentang Pengarusutamaan Ekoteologi dalam Kurikulum Pendidikan Keagamaan serta standardisasi kompetensi ekologis bagi penyuluh agama. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu merombak pandangan antroposentris menjadi ekosentris, mengubah kepasifan menjadi agensi responsif, serta menyatukan akal dan iman sebagai fondasi resiliensi bangsa. Dengan mengintegrasikan literasi bencana berbasis sains ke dalam narasi spiritual, peran agama bertransformasi dari sekadar praktik ritual menjadi instrumen penyelamatan nyawa yang dinamis dan berkelanjutan demi kemaslahatan publik di tengah ancaman krisis lingkungan global.

To cite this article: Venny Rosalina. (2026). "Integration of Science and Theology: Transformation of Religious Paradigm in National Disaster Mitigation Policy". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), Mei-Agustus, 2026. Page: 19 – 36.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan global saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, di mana frekuensi dan intensitas bencana alam terus meningkat secara eksponensial. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan yang terlalu teknosentris terbukti gagal menyentuh dimensi terdalam manusia, yaitu kesadaran etis dan spiritual terhadap alam. Kegagalan ini berakar pada paradigma modern yang memisahkan antara kemajuan material dengan keberlanjutan ekosistem. Akibatnya, kebijakan publik seringkali hanya menjadi pemadam kebakaran saat bencana terjadi, tanpa pernah memperbaiki akar masalah di tingkat kesadaran ([Ar Jabbar dan Nadir 2025](#)).

Dalam konteks sosiologis, masyarakat membutuhkan kerangka makna untuk memahami mengapa mereka harus peduli terhadap lingkungan di luar kepentingan ekonomi sesaat. Tanpa kerangka makna ini, alam hanya akan dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi hingga batas terakhirnya. Pandangan yang bersifat eksploitatif ini telah mendarah daging dalam sistem pembangunan global yang sangat antroposentris. Manusia merasa menjadi penguasa tunggal atas alam semesta tanpa kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ([Subu 2018](#)).

Munculnya fatalisme teologis di daerah rawan bencana merupakan indikator nyata dari kegagalan komunikasi risiko yang menyentuh aspek kognitif-religius. Ketika masyarakat memahami bencana semata-mata sebagai "kemarahan Tuhan" atau "takdir absolut"

tanpa melibatkan pemahaman mengenai hukum alam (*Sunnatullah*), maka agensi manusia untuk melakukan tindakan preventif akan lumpuh. Kondisi ini diperburuk oleh literalisme penafsiran teks agama yang seringkali memisahkan antara kesalehan ritual dengan kesalehan ekologis, sehingga menjaga lingkungan tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah. Fatalisme teologis menjadi hambatan utama ketika masyarakat menganggap bencana sebagai "takdir buta" yang tidak dapat diintervensi. Pandangan ini menyebabkan masyarakat mengabaikan sistem peringatan dini dan menolak melakukan evakuasi karena merasa "kematian sudah ditentukan" ([Kusuma dan Muzani 2024](#)). Secara sosiologis, fatalisme ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis untuk meredakan kecemasan, namun secara praktis ia sangat mematikan. Tanpa adanya reinterpretasi terhadap doktrin takdir, masyarakat akan terus berada dalam kerentanan yang tinggi.

Literalisme menciptakan dinding pemisah yang tebal antara pengetahuan teknis dan keyakinan spiritual. Dalam banyak kasus, penyuluh bencana kesulitan meyakinkan masyarakat tentang bahaya bencana alam karena narasi agama yang berkembang di masyarakat adalah narasi "hukuman". Jika bencana dianggap sebagai hukuman, maka satu-satunya jalan keluar adalah tobat ritual, bukan penguatan infrastruktur. Padahal, tobat yang sejati dalam ekoteologi mencakup perbaikan perilaku terhadap alam ([Saminan dkk. 2023](#)).

Penting untuk dipahami bahwa literalisme bukanlah sekadar kesalahan baca, melainkan sebuah pilihan ideologis yang menutup ruang bagi dialog sains. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu merespons tanda-tanda alam secara rasional. Misalnya, ketika permukaan air laut naik, masyarakat literalis mungkin tidak melihatnya sebagai ancaman iklim, melainkan sebagai fenomena misterius yang hanya bisa diserahkan pada doa. Sikap ini sangat berbahaya di tengah negara yang dikelilingi oleh *Ring of Fire* ([Taufiq Al Ashfahani Qodrifuddin dkk. 2022](#)).

Kebijakan ekoteologi harus menjadi jembatan permanen untuk menghapus dikotomi ini. Regulasi harus mewajibkan agar setiap kurikulum pendidikan agama mengandung elemen "literasi alam" yang berbasis data sains terbaru. Demikian pula, kebijakan penanggulangan bencana harus melibatkan perspektif teologis agar instruksi keselamatan memiliki "kekuatan spiritual" di mata masyarakat. Sinkronisasi antara akal dan iman adalah kunci resiliensi jangka panjang ([Barizi dan Yufarika 2025](#)).

Masalah kurangnya pemahaman ekoteologi bukan sekadar masalah intelektual, melainkan masalah hidup dan mati. Fatalisme, literalisme, dan dikotomi ilmu adalah musuh nyata bagi resiliensi bangsa yang harus segera diatasi melalui regulasi yang berani dan integratif ([Simatupang 2025a](#)).

Identifikasi Masalah

Berikut adalah 3 masalah utama berdasarkan latar belakang masalah:

1. Antroposentrisme Sempit dalam Penafsiran Agama

Masalah utama terletak pada pandangan teologis yang terlalu berpusat pada manusia (antroposentrisme). Banyak kelompok masyarakat meyakini bahwa alam hanyalah objek untuk dieksploitasi demi kebutuhan manusia, tanpa melihat adanya tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap lingkungan sebagai ciptaan Tuhan ([Abdillah 2014](#)).

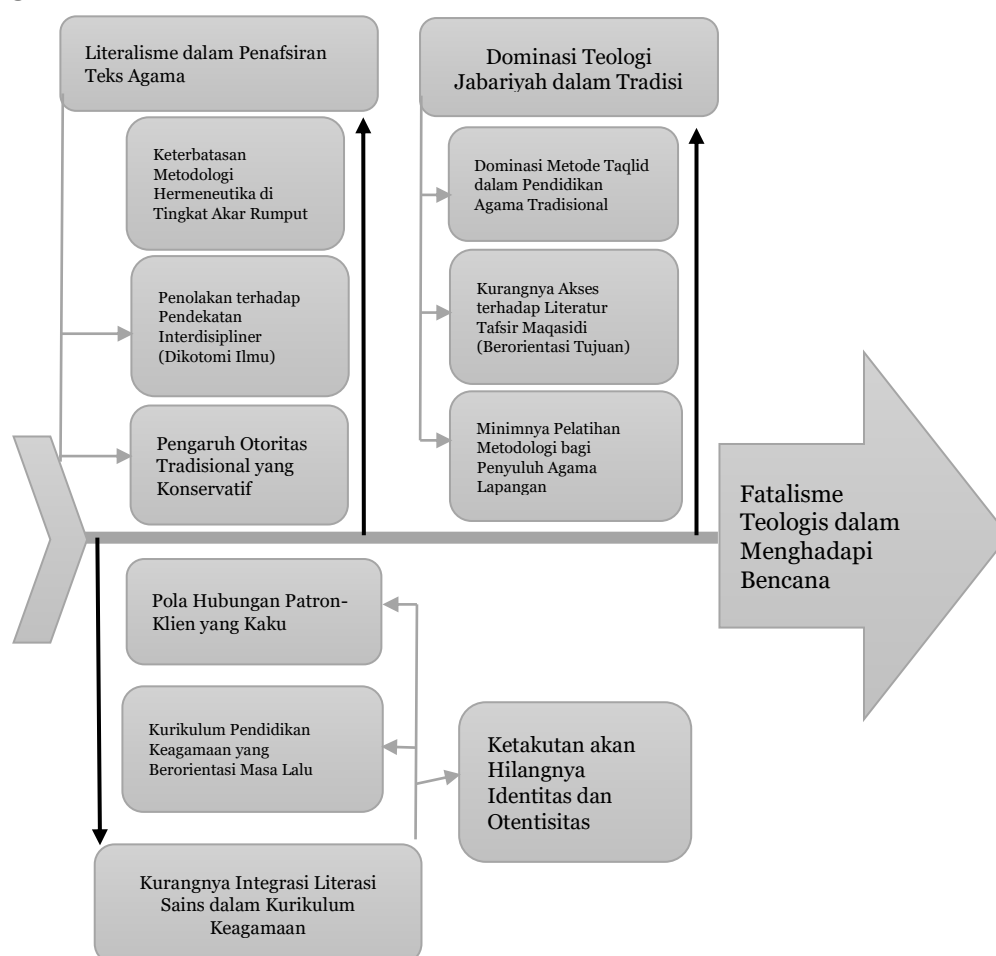
2. Fatalisme Teologis dalam Menghadapi Bencana

Kurangnya pemahaman ekoteologi sering kali memunculkan sikap fatalisme, di mana bencana alam dianggap semata-mata sebagai takdir atau hukuman Tuhan yang tidak bisa dihindari. Sikap ini melemahkan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural karena masyarakat merasa tindakan preventif manusia tidak akan mengubah kehendak ilahi. ([Suryadilaga 2013](#))

3. Terputusnya Relasi Etika Lingkungan dengan Praktik Ritual

Masalah lainnya adalah adanya dikotomi antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial-ekologis. Masyarakat sering kali sangat taat dalam menjalankan ibadah formal, namun tidak melihat pelestarian alam (seperti menjaga daerah aliran sungai atau hutan) sebagai bagian integral dari iman. Akibatnya, peringatan dini bencana berbasis alam sering diabaikan karena dianggap tidak berkaitan dengan nilai-nilai spiritual ([Agow dan Mawuntu 2026](#)).

Identifikasi masalah di atas dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG.

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Antroposentrisme Sempit dalam Penafsiran Agama	4	5	4	13
2	Fatalisme Teologis dalam Menghadapi Bencana	5	5	5	15
3	Terputusnya Relasi Etika Lingkungan dengan Praktik Ritual	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 adalah Fatalisme Teologis dalam Menghadapi Bencana. Masalah ini menjadi prioritas utama karena bersentuhan langsung dengan nyawa manusia saat bencana terjadi. Urgensinya sangat tinggi karena mentalitas ini menghambat masyarakat untuk melakukan evakuasi atau mitigasi saat bencana mengancam nyawa dalam waktu dekat.

Rumusan Masalah

Stagnasi mitigasi dan penanggulangan bencana muncul akibat dominasi fatalisme teologis dan pemahaman teks agama secara literal yang disebabkan oleh dikotomi ilmu, sehingga menghalangi terciptanya solusi holistik-interdisipliner yang memadukan spiritualitas dengan sains.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mereduksi Fatalisme Teologis: Merumuskan strategi komunikasi risiko yang mampu mengubah persepsi masyarakat dari kepasifan teologis menjadi agensi responsif melalui reinterpretasi konsep takdir dan *Sunnatullah*.
2. Menghapus Dikotomi Ilmu: Mengintegrasikan literasi sains kebencanaan ke dalam sistem pendidikan keagamaan guna menyatukan pemahaman antara hukum alam (empiris) dan nilai-nilai spiritual (transendental).
3. Mentransformasi Agensi Manusia: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana dengan membingkai aksi pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral sebagai *Khalifah*.
4. Memberikan Landasan Regulasi: Menyediakan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi otoritas terkait (seperti Kementerian Agama dan BNPB) untuk melegitimasi peran institusi keagamaan dalam pengurangan risiko bencana nasional.

Manfaat Kajian:

1. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara teologi dan ekologi, khususnya dalam konteks sosiologi agama di negara rawan bencana.
2. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berupaya menjembatani celah antara ilmu sains murni dan ilmu humaniora/agama.
3. Memberikan panduan strategis dalam menyusun kurikulum pendidikan keagamaan yang adaptif terhadap ancaman bencana serta standardisasi kompetensi bagi penyuluh agama.

4. Memperkuat peran Pesantren dan Madrasah sebagai pusat resiliensi komunitas yang mandiri dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan jiwa melalui pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual, sehingga mampu merespons peringatan dini secara cepat dan tepat.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Konstruksi Sosial atas Risiko (*Social Construction of Risk*)

Teori ini menyatakan bahwa risiko bencana tidak hanya dipahami melalui data teknis-saintifik, tetapi dikonstruksi secara sosial melalui nilai, budaya, dan agama. Dalam konteks ini, fatalisme teologis adalah hasil dari konstruksi sosial di mana masyarakat menggunakan narasi agama untuk membingkai bencana sebagai "takdir" guna mengatasi ketakutan mereka. Jika konstruksi ini bersifat literal dan pasif, maka respons masyarakat terhadap sistem peringatan dini akan selalu rendah karena dianggap tidak relevan dengan kehendak ilahi ([Putri 2023](#)).

2. Teori Etika Lingkungan Ekosentris (*Ecological Ethics*)

Teori ini menantang pandangan antroposentrisme dan literalisme yang sempit. Dukungan teoritis ini menekankan bahwa agama seharusnya menjadi pendorong moral bagi pelestarian alam melalui konsep ketundukan manusia kepada hukum alam (Sunnatullah). Penolakan terhadap pendekatan interdisipliner dianggap melanggar prinsip integritas ciptaan, di mana sains dan spiritualitas seharusnya bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan hidup (biokonservasi) dan memitigasi risiko akibat kerusakan ekosistem ([Al Munir 2023a](#)).

3. Teori Aksi (*Action Theory*) - Peran Agensi Manusia

Teori ini (khususnya dalam perspektif sosiologi agama) menekankan pentingnya Agensi (kemampuan bertindak) di atas struktur. Masalah literalisme dan dikotomi ilmu telah melumpuhkan agensi manusia dalam menghadapi bencana. Secara teoritis, interpretasi agama yang transformatif (ekoteologi) seharusnya mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi preventif. Tanpa adanya integrasi antara iman dan ilmu (sains bencana), tindakan manusia akan tetap pasif dan tidak terarah pada keselamatan bersama ([Al Munir 2023a](#)).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Khalifah (*Stewardship*)

Konsep ini menekankan bahwa manusia bukan pemilik alam, melainkan pengelola atau wakil Tuhan di bumi yang diberikan tanggung jawab moral (amanah). Konsep ini berfungsi untuk membongkar literalisme yang pasif, dengan menegaskan bahwa setiap kerusakan alam dan kegagalan mitigasi bencana adalah bentuk kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya ([Ma'rufah 2025](#)).

2. Konsep Sunnatullah (*Natural Law*)

Dalam kerangka ekoteologi, bencana dipahami sebagai bagian dari Sunnatullah atau hukum alam yang konsisten, teratur, dan dapat dipelajari (sains). Dengan memahami konsep ini, masyarakat didorong untuk meninggalkan fatalisme karena Tuhan memerintahkan manusia untuk membaca tanda-tanda alam dan beradaptasi

terhadap pola-polanya demi keselamatan jiwa ([Ana Fithrotul Jannah dan Fathurrosyid 2024](#)).

3. Konsep Maqasid al-Shari'ah (*The Objectives of Law*)

Konsep ini menyediakan kerangka prioritas bahwa tujuan tertinggi agama adalah kemaslahatan, di mana perlindungan nyawa (*hifdz al-nafs*) harus didahulukan. Secara konseptual, upaya mitigasi bencana bukan sekadar tindakan teknis, melainkan sebuah kewajiban agama yang setara dengan ibadah ritual, karena bertujuan menyelamatkan ciptaan Tuhan ([Suhaimi, Rezi, dan Rahman Hakim 2023](#)).

4. Konsep Integritas Ciptaan (*Integrity of Creation*)

Konsep ini berasal dari pemikiran ekoteologi global yang menyatakan bahwa seluruh elemen alam semesta saling terhubung secara organik. Secara konseptual, dikotomi antara ilmu agama dan sains bencana harus dihapuskan karena keduanya merupakan cara untuk memahami kebenaran Tuhan. Menjaga keseimbangan ekosistem adalah bentuk penghormatan terhadap integritas ciptaan ([D. 2021](#)).

5. Konsep Fiqh Al-Bi'ah (*Environmental Jurisprudence*)

Konsep ini merupakan derivasi hukum yang spesifik mengatur relasi manusia dengan lingkungan hidup. *Fiqh Al-Bi'ah* memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk melakukan tindakan preventif bencana sebagai bagian dari ketaatan beragama, sehingga mampu merubah perilaku literal-konservatif menjadi perilaku pro-lingkungan yang responsif ([Makraja dan Ramlah 2025](#)).

METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada analisis teks dan fenomena sosial keagamaan di Indonesia. Tahapan awal dilakukan dengan mengidentifikasi krisis literasi dan hambatan teologis melalui telaah literatur terhadap dokumen kebijakan penanggulangan bencana serta naskah-naskah akademik terkait ekoteologi. Proses ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana nilai-nilai spiritual telah diintegrasikan atau justru terabaikan dalam regulasi teknokratis yang ada saat ini.

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Melalui instrumen ini, berbagai isu seperti antroposentrisme penafsiran dan dikotomi ilmu diuji untuk menentukan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap keselamatan jiwa. Prioritas yang terpilih kemudian dibedah akar penyebabnya menggunakan diagram *fishbone* guna melihat keterhubungan antara aspek literalisme, metode pendidikan tradisional, hingga pengaruh otoritas konservatif.

Analisis pembahasan dalam kajian ini diperkuat dengan dukungan teoretis yang bersifat interdisipliner, menggabungkan Teori Konstruksi Sosial atas Risiko, Etika Lingkungan Ekosentris, dan Teori Aksi. Penggunaan teori-teori tersebut berfungsi untuk membedah bagaimana persepsi risiko dibentuk oleh keyakinan masyarakat dan bagaimana agensi manusia dapat dipulihkan melalui reinterpretasi doktrin keagamaan yang transformatif. Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan konseptual yang kokoh baik dari sisi sains maupun teologi.

Tahap akhir metodologi ini adalah perumusan dan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn. Kelima alternatif kebijakan yang disusun

melalui proses sintesis data primer dan sekunder diuji berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil dari skoring tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan untuk diimplementasikan dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis lingkungan global saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dengan peningkatan frekuensi bencana alam secara eksponensial. Pendekatan yang selama ini bersifat teknosentris terbukti gagal menyentuh dimensi kesadaran etis dan spiritual manusia terhadap alam ([Ar Jabbar dan Nadir 2025](#)). Kegagalan ini berakar pada paradigma modern yang memisahkan kemajuan material dengan keberlanjutan ekosistem, sehingga kebijakan publik sering kali hanya bersifat reaktif.

Di Indonesia, pengabaian terhadap dimensi ekoteologi menyebabkan pesan mitigasi pemerintah sering kali tidak beresonansi dengan keyakinan transendental masyarakat. Padahal, masyarakat memiliki keterikatan emosional dan teologis yang sangat kuat terhadap alam. Keterputusan antara data sains mengenai ancaman bencana dengan perilaku nyata di lapangan terjadi karena tidak adanya dorongan moral yang kuat ([Simatupang 2025](#)).

Kajian mengidentifikasi bahwa masyarakat sangat membutuhkan kerangka makna sosiologis untuk memahami urgensi kepedulian lingkungan di luar kepentingan ekonomi ([Qurrotul'ain dan Khudori Soleh 2024](#)). Tanpa kerangka ini, alam hanya akan dipandang sebagai komoditas eksploitatif. Pandangan antroposentrisme yang mendarah daging membuat manusia merasa menjadi penguasa tunggal tanpa kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ([Al Munir 2023b](#)).

Rendahnya literasi sains sering kali berkelindan dengan apa yang disebut sebagai "kebutaan teologis". Masyarakat gagal mengaitkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya tutupan hutan, dengan risiko bencana yang mereka alami secara langsung. Alam tidak lagi dipandang sebagai ciptaan sakral yang harus dijaga keberlangsungannya ([Yuono 2019](#)).

Masalah prioritas utama yang ditemukan adalah fatalisme teologis dalam menghadapi bencana. Ketika bencana dipahami semata-mata sebagai kemarahan Tuhan atau takdir absolut tanpa melibatkan hukum alam (*Sunnatullah*), agensi manusia untuk melakukan tindakan preventif akan lumpuh. Kondisi ini diperburuk oleh literalisme penafsiran teks yang memisahkan kesalehan ritual dari kesalehan ekologis ([Ngahu 2020](#)).

Secara sosiologis, fatalisme berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis untuk meredam kecemasan, namun secara praktis sangat mematikan ([Suryandari dan Wijayani 2022](#)). Pandangan ini menyebabkan masyarakat mengabaikan sistem peringatan dini dan menolak evakuasi karena merasa kematian adalah takdir yang tidak dapat diintervensi. Tanpa reinterpretasi doktrin takdir, tingkat kerentanan masyarakat akan tetap tinggi.

Kajian juga menemukan adanya dikotomi ilmu yang tajam dalam sistem pendidikan nasional. Sains dianggap sebagai domain sekuler, sementara agama dianggap sebagai domain privat yang terpisah. Dualisme ini melumpuhkan kognisi masyarakat dalam merespons kebijakan penanggulangan bencana yang dianggap sebagai urusan duniawi semata ([Humairah dkk. 2024a](#)).

Di tingkat institusional, terjadi ego sektoral antara kementerian yang mengurus agama dengan kementerian yang mengurus lingkungan. Program mitigasi jarang sekali terintegrasi secara mendalam ke dalam khutbah resmi atau kurikulum pendidikan keagamaan ([Jerniah Nasution 2024](#)). Komunikasi risiko sering kali menggunakan bahasa teknis yang "dingin" dan tidak menyentuh hati masyarakat religius.

Masalah sistemik lainnya ditemukan pada kurikulum pendidikan di Madrasah dan Pesantren yang masih minim memuat materi etika lingkungan. Fragmentasi pengetahuan menyebabkan generasi muda tumbuh dengan pandangan dunia yang terbelah antara iman dan ilmu. Padahal, penguatan kurikulum ekoteologi sangat mendesak untuk membentuk karakter religius yang sadar lingkungan ([Ratnasari dkk. 2025](#)).

Literalisme penafsiran menciptakan dinding pemisah yang tebal antara pengetahuan teknis dan keyakinan spiritual. Narasi agama di tingkat akar rumput sering kali hanya berfokus pada konsep "hukuman" Tuhan. Akibatnya, satu-satunya jalan keluar yang dipahami masyarakat adalah tobat ritual, bukan penguatan infrastruktur atau mitigasi teknis ([Harahap 2018](#)).

Otoritas keagamaan lokal memegang peranan kunci, namun mereka sering kali tidak dibekali dengan literasi sains bencana yang memadai. Ketidaksinambungan ini menciptakan ruang bagi sikap konservatif-pasif yang justru menghambat efektivitas sistem peringatan dini ([Iskandar dan Yunanto 2025a](#)). Perlu adanya saintifikasi pemahaman umat agar lebih responsif terhadap risiko.

Analisis menggunakan metode USG menegaskan bahwa fatalisme teologis memiliki tingkat urgensi dan keseriusan tertinggi karena bersentuhan langsung dengan nyawa manusia. Mentalitas ini menghambat tindakan cepat saat bencana mengancam jiwa dalam waktu dekat. Akar masalahnya mencakup dominasi metode *taqlid* dan keterbatasan metodologi hermeneutika ([Parwanto 2019](#)).

Kajian menunjukkan bahwa ketaatan beragama seharusnya tidak dipisahkan dari perilaku ekologis. Merusak ekosistem harus dipandang sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab spiritual sebagai penjaga keseimbangan ciptaan ([Rachman 2025](#)). Penghapusan dikotomi ilmu akan memungkinkan kolaborasi antara peta risiko sains dengan dorongan moral agama.

Revitalisasi agensi manusia memerlukan penyatuan dimensi iman dan ilmu. Integrasi ini memungkinkan masyarakat melihat upaya preventif, seperti pelestarian hutan, sebagai perwujudan tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan pembangkangan terhadap takdir. Tanpa sinergi ini, tindakan manusia akan tetap terfragmentasi dan kehilangan arah ([Novanda 2024a](#)).

Akhirnya, integrasi ekoteologi melalui kebijakan yang berani diharapkan dapat menghapus hambatan kognitif masyarakat. Kebijakan ini harus mampu mentransformasi teks keagamaan menjadi aksi hidup yang responsif terhadap risiko bencana ([Agow dan Mawuntu 2026](#)). Sinkronisasi antara akal dan iman adalah kunci utama resiliensi bangsa dalam jangka panjang.

Analisis terhadap krisis literasi bencana di Indonesia menunjukkan bahwa risiko tidak hanya dipahami melalui data teknis-saintifik, tetapi dikonstruksi secara sosial melalui nilai, budaya, dan agama. Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial atas Risiko, fatalisme teologis yang berkembang di masyarakat merupakan hasil dari konstruksi sosial di mana narasi agama digunakan untuk membingkai bencana sebagai "takdir" guna meredam kecemasan psikologis ([Ar Jabbar dan Nadir 2025](#)). Namun, konstruksi yang bersifat pasif ini justru melumpuhkan agensi manusia dalam merespons sistem peringatan dini karena dianggap tidak relevan dengan kehendak ilahi.

Persepsi individu terhadap bahaya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial dan sistem kepercayaan yang dominan di lingkungannya. Dalam masyarakat yang sangat religius, risiko bencana sering kali tidak dipandang sebagai anomali geofisika semata, melainkan sebagai fenomena yang sarat akan makna spiritual. Hal ini menciptakan hambatan kognitif di mana sains diposisikan sebagai entitas yang terpisah, atau bahkan bertentangan, dengan keimanan ([Purnomo 2018](#)).

Konstruksi sosial yang pasif memiliki implikasi serius terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Jika masyarakat secara kolektif meyakini bahwa perlindungan diri adalah upaya sia-sia di hadapan ketetapan absolut, maka investasi pada teknologi mitigasi akan kehilangan relevansi fungsionalnya ([Ridwan 2016](#)). Oleh karena itu, penguatan resiliensi harus menyentuh proses rekonstruksi narasi agama agar selaras dengan upaya penyelamatan jiwa.

Masalah ini diperparah oleh pandangan antroposentrisme yang memposisikan manusia sebagai pemilik tunggal alam semesta. Teori Etika Lingkungan Ekosentris hadir untuk menantang paradigma ini dengan menekankan bahwa alam memiliki integritas dan hak untuk lestari. Dalam perspektif ekoteologi, ketaatan beragama seharusnya diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum alam atau *Sunnatullah* ([Al Munir 2023](#)).

Pelestarian ekosistem tidak boleh dipisahkan dari perilaku religius, karena merusak alam dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab spiritual manusia sebagai penjaga keseimbangan ciptaan. Etika ekosentris menuntut penghapusan dikotomi antara sains dan spiritualitas melalui pendekatan interdisipliner yang integratif. Penolakan terhadap data ilmiah mengenai risiko lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip integritas ciptaan Tuhan ([Agow dan Mawuntu 2026](#)).

Kolaborasi antara peta risiko teknis dan motivasi spiritual sangat krusial untuk menciptakan respons mitigasi yang efektif. Ketika sains memberikan data dan agama memberikan dorongan moral, maka mitigasi bencana bertransformasi dari sekadar kebijakan administratif menjadi sebuah gerakan penyelamatan kehidupan yang holistik ([Rakuasa, Latue, dan Paknany 2024](#)). Hal ini menjadi landasan bagi pemulihan kapasitas bertindak masyarakat di tengah ancaman krisis.

Dalam perspektif sosiologi agama, Teori Aksi menekankan pentingnya agensi atau kemampuan bertindak manusia di atas struktur sosial. Namun, masalah literalisme dan dikotomi ilmu yang tajam telah melumpuhkan agensi tersebut dalam menghadapi bencana. Ketika teks agama dipahami secara kaku, individu kehilangan daya dorong untuk melakukan perubahan karena merasa realitas sepenuhnya berada di luar kendali mereka ([Rifa'i 2018](#)).

Akibat dari kelumpuhan agensi ini, masyarakat terjebak dalam kepasifan struktural yang menghambat inovasi keselamatan. Manusia seharusnya menjadi aktor yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan bermakna secara sadar, bukan sekadar penerima pasif dari doktrin keagamaan ([Khalid dan Fansuri 2025](#)). Revitalisasi agensi memerlukan interpretasi agama yang transformatif melalui kerangka ekoteologi yang integratif.

Integrasi antara dimensi iman dan ilmu memungkinkan masyarakat melihat upaya preventif, seperti penguatan bangunan atau pelestarian hutan, sebagai perwujudan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanpa adanya sinergi ini, tindakan manusia akan tetap terfragmentasi dan kehilangan arah. Perlu adanya penyatuan visi agar transformasi sosial menuju masyarakat sadar bencana memiliki basis gerakan yang kuat di tingkat akar rumput ([Novanda 2024](#)).

Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya Konsep Khalifah sebagai dasar tanggung jawab moral manusia sebagai pengelola bumi. Konsep ini berfungsi untuk membongkar pola pikir literalisme yang pasif dengan menegaskan bahwa kegagalan mitigasi adalah bentuk kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya ([Irhamullah, Wahyu Hidayat, dan Herlini Puspika Sari 2025](#)). Sebagai *khalifah*, manusia diwajibkan terlibat aktif dalam menjaga keseimbangan ciptaan.

Selain itu, pemahaman terhadap Sunnatullah (hukum alam) memberikan mandat bagi manusia untuk aktif membaca tanda-tanda alam demi keselamatan jiwa. Dalam ekoteologi, bencana dipahami sebagai bagian dari ketetapan Tuhan yang bekerja melalui mekanisme alamiah yang konsisten dan dapat dipelajari melalui sains. Pemahaman ini krusial untuk mendekonstruksi fatalisme teologis karena bencana memiliki pola yang dapat diprediksi secara empiris ([Kristiyanto 2015](#)).

Implementasi kebijakan juga harus bersandar pada Maqasid al-Shari'ah, di mana perlindungan nyawa (*hifdz al-nafs*) merupakan tujuan tertinggi agama yang harus didahulukan ([Iskandar dan Yunanto 2025](#)). Mitigasi bencana bukan sekadar tindakan teknis, melainkan kewajiban agama yang setara dengan ibadah ritual karena bertujuan menyelamatkan ciptaan Tuhan. Melalui lensa ini, keselamatan manusia menjadi orientasi utama dari keberagaman yang benar.

Dukungan konsep Integritas Ciptaan lebih lanjut menegaskan bahwa seluruh elemen alam semesta saling terhubung secara organik. Segala bentuk kerusakan pada satu bagian ekosistem akan berdampak pada keseluruhan sistem dan mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bentuk penghormatan terhadap keutuhan ciptaan Sang Pencipta ([Akbar 2024](#)).

Terakhir, konsep Fiqh Al-Bi'ah (hukum lingkungan) menyediakan landasan yuridis-keagamaan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan preventif sebagai bentuk ketaatan beragama ([Yusran, Abd. Wahid Haddade, dan Patimah 2026](#)). Fiqh ini memperluas cakupan hukum dari sekadar ritual individual menjadi perlindungan ekosistem yang bersifat kolektif. Tindakan merusak alam yang memicu bencana harus dipandang sebagai perbuatan terlarang secara agama.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi dari perilaku literal-konservatif menuju perilaku pro-lingkungan yang responsif memerlukan sinergi regulasi dan teologi. Ketaatan beragama tidak lagi hanya diukur dari kesalehan ritual, tetapi dari kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan alam. Sinkronisasi antara akal (sains) dan iman (teologi) adalah kunci utama pembangunan resiliensi bangsa jangka panjang ([Novanda 2024](#)).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan regulasi payung (*umbrella act*) yang secara fundamental menggeser paradigma manajemen bencana di Indonesia dari yang bersifat responsif-darurat menjadi preventif-komprehensif. Melalui undang-undang ini, negara menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukanlah tanggung jawab otoritas tunggal, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penekanan pada aspek pencegahan dan kesiapsiagaan dalam regulasi ini memberikan ruang hukum bagi penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pendekatan, termasuk integrasi nilai-nilai budaya dan spiritual yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif dalam menghadapi ancaman alam.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum vital yang mengintegrasikan

aspek kelestarian ekosistem ke dalam kerangka pembangunan nasional. Melalui regulasi ini, negara memberikan jaminan perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap mampu menyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara yuridis, undang-undang ini mengakui bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum yang kuat untuk mensinergikan kebijakan pemerintah dengan realitas sosiologis dan nilai-nilai lokal yang ada di lapangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan instrumen operasional yang mengatur secara detail aspek perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan mitigasi di berbagai sektor. Salah satu mandat strategis dalam peraturan ini adalah kewajiban untuk mengintegrasikan pendidikan penanggulangan bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal serta pelatihan teknis. Regulasi ini memberikan landasan prosedural bagi pemerintah untuk menyusun modul kesiapsiagaan yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas mental dan kognitif masyarakat dalam menghadapi ancaman alam yang dinamis.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal ini memberikan mandat legal bagi pesantren untuk aktif dalam isu-isu sosial-ekologis, termasuk menjadi pusat koordinasi mitigasi bencana di tingkat lokal.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Regulasi ini mengatur tata kerja unit-unit di bawah Kemenag, termasuk peran Penyuluh Agama. Pasal-pasal di dalamnya memberikan celah untuk memasukkan tugas tambahan bagi penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, yang secara interpretatif mencakup edukasi pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada ruang lingkup kebijakan di bawah naungan Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan penekanan khusus pada transformasi paradigma ekoteologi dalam masyarakat beragama di Indonesia. Pembahasan dibatasi pada analisis hambatan sosiologis-teologis seperti fatalisme teologis, literalisme penafsiran, dan dikotomi ilmu yang menjadi penghambat agensi manusia dalam menghadapi risiko bencana. Kajian ini tidak melakukan pengujian teknis terhadap kekuatan struktur bangunan atau infrastruktur fisik mitigasi, melainkan menitikberatkan pada rekonstruksi kebijakan yang bersifat non-struktural melalui penguatan kurikulum pendidikan dan kapasitas penyuluh agama. Selain itu, referensi regulasi dan landasan teoretis yang digunakan disesuaikan dengan konteks keragaman budaya dan religiusitas di Indonesia, sehingga efektivitas implementasinya sangat bergantung pada tingkat penerimaan otoritas keagamaan lokal dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral di masa depan.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana nasional melalui pengintegrasian dimensi ekoteologi yang selama ini terabaikan dalam kebijakan teknokratis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur mengenai manajemen risiko dengan membuktikan bahwa

resiliensi komunitas sangat bergantung pada rekonstruksi konstruksi sosial yang menyatukan sains dan spiritualitas untuk mengatasi fatalisme teologis. Secara praktis, naskah kebijakan ini menawarkan solusi konkret bagi Kementerian Agama untuk mentransformasi peran penyuluh agama dan lembaga pendidikan seperti Pesantren dan Madrasah dari institusi ritual murni menjadi pusat agensi manusia yang proaktif dalam mitigasi bencana. Dengan demikian, kajian ini menjembatani kesenjangan komunikasi risiko antara otoritas negara dan masyarakat religius, sekaligus menyediakan landasan regulasi untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memiliki ketangguhan fisik, tetapi juga kesadaran ekologis yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan demi keberlanjutan hidup di tengah ancaman krisis lingkungan global.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

- Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi dalam Kurikulum Pendidikan Keagamaan.
- Regulasi ini bertujuan untuk mewajibkan integrasi materi ekologi dan literasi bencana ke dalam kurikulum Madrasah, Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
- Alternatif 2: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BNPB tentang Program "Rumah Ibadah Tangguh Bencana".
- Regulasi ini mengatur standarisasi rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, dll) sebagai pusat edukasi mitigasi sekaligus tempat perlindungan sementara (*shelter*) yang aman secara struktur.
- Alternatif 3: Peraturan Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) tentang Standardisasi Sertifikasi Penyuluh Agama Berwawasan Ekologi.
- Mewajibkan setiap penyuluh agama lapangan untuk memiliki kompetensi dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana (PRB).

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya kriteria evaluasi dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.

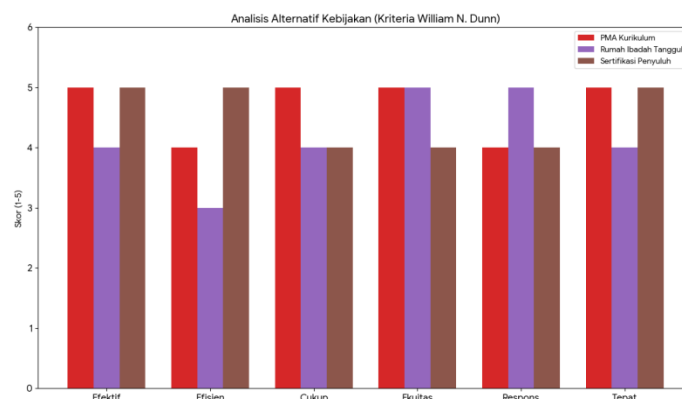
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	PMA Kurikulum Ekoteologi	5	4	5	5	4	5	28
2	Rumah Ibadah Tangguh Bencana	4	3	4	5	5	4	25
3	Sertifikasi Penyuluh Berwawasan Ekologi	5	5	4	4	4	5	27

Berdasarkan analisis skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi dalam Kurikulum Pendidikan Keagamaan sebagai solusi jangka panjang untuk menghapus literalisme.

Berikut analisis skoring Dunn dalam bentuk grafik:



Meskipun Alternatif 2: Sertifikasi Penyuluh Berwawasan Ekologi juga menunjukkan hasil yang cukup baik (27), Alternatif 1 unggul karena memiliki nilai Adekuasi dan Ketepatan yang sangat tinggi. Alternatif 1 menyasar akar masalah (literalisme) secara sistemik pada fase formatif (pendidikan). Perubahan paradigma pada level kurikulum akan menciptakan dampak jangka panjang yang stabil.

Untuk mencapai efektivitas maksimal, kebijakan Alternatif 1 (Kurikulum) dan Alternatif II (Sertifikasi) harus dijalankan secara paralel. Kurikulum berperan sebagai solusi jangka panjang untuk menghapus literalisme, sedangkan sertifikasi penyuluh berperan sebagai solusi jangka pendek untuk memutus fatalisme teologis yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa kegagalan kebijakan mitigasi bencana selama ini berakar pada pendekatan yang terlalu teknosentris dan mengabaikan dimensi spiritualitas masyarakat Indonesia. Masalah utama yang ditemukan adalah dominasi fatalisme teologis yang melumpuhkan agensi manusia, di mana bencana dipahami secara keliru sebagai takdir absolut tanpa mempertimbangkan hukum alam atau *Sunnatullah*. Hal ini diperburuk oleh adanya dikotomi ilmu yang memisahkan antara pengetahuan agama dan sains, serta literalisme penafsiran teks suci yang memisahkan kesalehan ritual dari kesalehan ekologis.

Secara teoretis dan konseptual, transformasi paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan kunci untuk memulihkan kapasitas bertindak masyarakat. Melalui integrasi konsep *Khalifah*, *Maqasid al-Shari'ah*, dan *Fiqh Al-Bi'ah*, setiap upaya mitigasi bencana dapat diredifinisi sebagai kewajiban agama yang setara dengan ibadah ritual guna menjaga keselamatan jiwa (*hifdz al-nafs*). Penghapusan dikotomi ilmu memungkinkan terbangunnya sinergi antara peta risiko saintifik dengan dorongan moral keagamaan, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap peringatan dini meningkat karena memiliki landasan spiritual yang kuat.

Sebagai solusi strategis, diperlukan intervensi regulasi yang berani melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama mengenai pengarusutamaan ekoteologi dalam kurikulum pendidikan keagamaan dan bimbingan masyarakat. Kebijakan ini akan merombak struktur fatalisme melalui institusi pendidikan seperti Madrasah dan Pesantren serta memberdayakan penyuluh agama sebagai agen resiliensi di garda terdepan. Dengan menyatukan kekuatan iman dan kecerdasan sains, Indonesia dapat membangun masyarakat yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi bencana, tetapi juga aktif bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi sebagai rumah bersama.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Integrasi Ekoteologi dalam Sistem Pendidikan dan Layanan Keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk merombak paradigma fatalisme teologis dan literalisme sempit melalui dua langkah strategis: *Pertama*, mewajibkan pengarusutamaan literasi bencana berbasis sains ke dalam kurikulum seluruh jenjang pendidikan keagamaan guna menghapus dikotomi ilmu; *Kedua*, mengimplementasikan standarisasi kompetensi ekologis bagi penyuluh agama dan da'i agar mampu memberikan tafsir teks suci yang kontekstual dan responsif terhadap keselamatan lingkungan. Melalui regulasi ini, peran agama akan bergeser dari sekadar praktik ritual menjadi instrumen penggerak agensi masyarakat yang tangguh, proaktif, dan bertanggung jawab dalam memitigasi risiko bencana demi kemaslahatan publik secara luas.

REFERENSI

- Abdillah, Junaidi. 2014. "DEKONSTRUKSI TAFSIR ANTROPOSENTRISME: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan." *KALAM* 8(1):65. doi:10.24042/klm.v8i1.168.
- Agow, Zwingly Zchwarz Niklas, dan Marhaeni Mawuntu. 2026a. "KAJIAN TEOLOGIS-ETIS: SOLIDARITAS EKOLOGIS TERHADAP RELASI IMAN, BUDAYA, DAN

- ALAM CIPTAAN.” *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2(1):54–69. doi:10.63536/imitatiochristo.v2i1.68.
- Akbar, Muhammad Idnan. 2024. “Ekospiritualisme Al-Qur’an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah Fî Al-Ardh dalam Penyelamatan Alam).” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2(5):507–23. doi:10.57096/blantika.v2i5.141.
- Al Munir, M. Ied. 2023a. “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9(1):19. doi:10.24235/jy.v9i1.10000.
- Ana Fithrotul Jannah dan Fathurrosyid. 2024. “TEOLOGI BENCANA PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *Jurnal Studi Qur’an dan Tafsir* 3(1):68–88. doi:10.59005/jsqt.v3i1.538.
- Ar Jabbar, Andi Ridha Aulia, dan Sakinah Nadir. 2025a. “Governance Berbasis Spiritualitas: Peran Ajaran Agama dalam Politik Lingkungan Indonesia.” *VOX POPULI* 8(2):159–78. doi:10.24252/vp.v8i2.61077.
- Barizi, Ahmad, dan Sda Defi Yufarika. 2025. “Ekologi dalam Al-Quran dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam.” *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9(2):1033. doi:10.35931/am.v9i2.4822.
- D., Didiharyono. 2021. “Integrasi Keilmuan antara Sains & Teknologi dengan Agama (Suatu Konsepsi dalam Upaya Mengikis Dikotomi Ilmu).”
- Harahap, Ahmad Yunus Mokoginta. 2018. “SPRITUALISME DAN PLURALISME AGAMA.” *Jurnal As-Salam* 2(1):28–36. doi:10.37249/as-salam.v2i1.7.
- Humairah, Andi Eliyah, A. Marjuni, Moh. Natsir Mahmud, dan Sukawati Sukawati. 2024a. “Memahami Dikotomi Ilmu Pengetahuan Umum dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” *JUPENJI: Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia* 3(3):15–25. doi:10.57218/jupenji.Vol3.Iss3.1165.
- Irhamullah, Wahyu Hidayat, dan Herlini Puspika Sari. 2025. “Khilafah Lingkungan: Peran Manusia Sebagai Khalifah dalam Menjaga Bumi.” *QAZI : Journal of Islamic Studies* 2(2):435–47. doi:10.61104/qz.v2i2.465.
- Iskandar, dan Sri Yunanto. 2025a. “Relevansi Peran Pemuka Agama Islam dalam Mitigasi Bencana.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5(1):7. doi:10.53697/iso.v5i1.2357.
- Jerniah Nasution, Uci. 2024. “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Krisis Lingkungan.” *Pedagogik: Jurnal Pendidikan dan Riset* 2(3):385–92. doi:10.65311/pedagogik.v2i3.970.
- Khalid, Khalisah, dan Hamzah Fansuri. 2025. “Spiritualitas Ekologis: Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Iklim.” *MAARIF* 19(2). doi:10.47651/mrf.v19i2.260.
- Kristiyanto, Kristiyanto. 2015. “EKO-PSIKOLOGI KESEIMBANGAN ANTARA SAINS DAN AGAMA DALAM MENCAPAI KEHORMANISAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1(1):1–26. doi:10.24952/multidisipliner.v1i1.283.
- Kusuma, Bukhori Brata, dan Muzani Muzani. 2024. “Pendidikan Bencana Dalam Perspektif Islam.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7(4):61–74. doi:10.37329/kamaya.v7i4.3749.
- Makraja, Fahmi, dan Ramlah Ramlah. 2025. “IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL FIQH IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF

- MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH JASSER AUDA." *Hukum Islam* 24(2):277. doi:10.24014/hi.v24i2.31378.
- Ma'rufah, Hafidhoh. 2025. "Faith-Based Environmentalism: Sahal Mahfudz and the Ecological Transformation of *Pesantren*." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19(2):309–36. doi:10.14421/tt7nkc43.
- Mawardi, dan Desy Kurniawati. 2025. "Integrative Review Analisis Kebutuhan Pengembangan Kurikulum IPA Terintegrasi Pendidikan Mitigasi Bencana di Indonesia." *Journal of Global Research Education* 2(2):97–110. doi:10.62194/we5cfj47.
- Ngahu, Silva S. Thesalonika. 2020. "Mendamaikan Manusia dengan Alam." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2(2):77–88. doi:10.36270/pengarah.v2i2.28.
- Novanda, Ramazani. 2024a. "Religion and Environment: Transintegration of Science in Realizing Environmental Sustainability." *Journal of Applied Transintegration Paradigm* 3(2). doi:10.30631/mp15px68.
- Parwanto, Wendi. 2019. "TEOLOGI BENCANA PERSPEKTIF HADIS." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2(1):69–90. doi:10.32505/al-bukhari.v2i1.1132.
- Purnomo, Agus. 2018. "PEMBANGUNAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DI SEKITAR GUNUNG API TENTANG RISIKO BENCANA ERUPSI." *Media Komunikasi Geografi* 19(1):1. doi:10.23887/mkg.v19i1.13610.
- Putri, Dini Eka. 2023. "Kesiapsiagaan Masyarakat Surabaya Terhadap Potensi Bencana Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25(1):278–85. doi:10.26623/jdsb.v25i1.4437.
- Qurrotul'ain, Diah, dan Achmad Khudori Soleh. 2024. "Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5(6):250–58. doi:10.59141/japendi.v5i6.2983.
- Rachman, Budhy Munawar-Rachman. 2025. "Moralitas Agama dalam Krisis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologis untuk Masa Depan Berkelanjutan." *MAARIF* 19(2). doi:10.47651/mrf.v19i2.261.
- Rakuasa, Heinrich, Philia Christi Latue, dan Yamres Pakniany. 2024. "Disaster Mitigation Through Education: A Holistic Approach for Rural Communities." *Jurnal Ulul Albab* 28(2):77. doi:10.31764/jua.v28i2.23522.
- Ratnasari, Juni, Kama Abdul Hakam, Mupid Hidayat, dan Aceng Kosasih. 2025. "Membangun Karakter Religius dan Peduli Lingkungan di Sekolah Berbasis Pesantren." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19(1):196. doi:10.35931/aq.v19i1.4309.
- Ridwan, Ita Rustiati. 2016. "MENYIKAPI BENCANA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL TERINTEGRASI." *Jurnal Geografi Gea* 10(1). doi:10.17509/gea.v10i1.1663.
- Rifa'i, Moh. 2018. "KAJIAN MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF PENDEKATAN SOSIOLOGIS." *AL-TANZIM: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM* 2(1):23–35. doi:10.33650/al-tanzim.v2i1.246.
- Saminan, Nurul Fajri, Andi Suhandi, Ida Kaniawati, Riandi Riandi, Muhammad Khairul, Saminan Saminan, dan Syafrizal Syafrizal. 2023. "Penanaman Sikap Siritual Dalam Peningkatan Literasi Kebencanaan Melalui Fenomena Kebumian dan Antariksa." *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika* 14(2):203–8. doi:10.26877/jp2f.v14i2.16225.

- Simatupang, Bona Ventro. 2025a. “Dignitas Manusia dalam Krisis Ekologi Berdasarkan Konsep Imago Dei dan Ekoteologi.” *Gorga: Journal of Constructive Theology* 2(1):19–33. doi:10.62926/jct.v2i1.108.
- Subu, Yan Yusuf. 2018. “Falsafah Hidup Sebagai Ecoliteracy Untuk Membangun Masyarakat Selaras Alam.” *Jurnal Masalah Pastoral* 6(2):27–39. doi:10.60011/jumpa.v6i2.65.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. 2023. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH: Teori dan Implementasi.” *Sahaja* 2(1):153–70. doi:10.61159/sahaja.v2i1.13.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2013. “Pemahaman Hadis Tentang Bencana (Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadis-hadis tentang Bencana).” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14(1):83–102. doi:10.14421/esensia.v14i1.751.
- Suryandari, Nikmah, dan Qoni’ah Nur Wijayani. 2022. “Mewaspadai Bencana: Perspektif Global tentang Komunikasi Risiko Bencana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8(2):162–69. doi:10.23887/jiis.v8i2.47497.
- Taufiq Al Ashfahani Qodrifuddin, Jumiati, Kartini, Maya Zulva, Mihratun, Rakyat Aini, Rina Kumala Utami, Siska Febri Cahyani, Uli Aprialis, Baiq Nilam Safitri, Widiyami Sayidah, dan Ahmad Raksun. 2022. “Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya dan Dampak Bencana Alam Serta Penanggulangannya.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5(1):173–77. doi:10.29303/jpmpi.v5i1.1400.
- Yuono, Yusup Rogo. 2019. “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2(1):186–206. doi:10.34081/fidei.v2i1.40.
- Yusran, Abd. Wahid Haddade, dan Patimah. 2026. “Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4(01):393–410. doi:10.70294/jimu.v4i01.1944.